



Peran dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia

Yurida Aulia^{1*}, Lokot Muda Harahap², Wulan Erdianti Putri³, Windah Frawyta Lestary Sinaga⁴

¹⁻⁴ Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: yuridaaulia13@gmail.com^{1*}, lokotmudahrp@unimed.ac.id², wulanerdianti2004@gmail.com³, windah28391@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: yuridaaulia13@gmail.com¹

Abstract. *Unemployment remains a structural challenge for the Indonesian economy. According to Statistics Indonesia (BPS), the Open Unemployment Rate (TPT) in August 2025 stood at 4.85%, with 7.46 million unemployed individuals, predominantly among the youth aged 15–24 years. This study aims to identify government policies addressing unemployment, analyze their roles, and assess their effectiveness. A literature review method with a qualitative descriptive approach was employed, drawing from indexed academic journals, government reports, and official statistical data. The findings reveal that the government has implemented multiple policies, including competency-based vocational training, labor-intensive cash programs, MSME development, investment promotion, and business climate reform. These policies have contributed to a gradual decline in unemployment, though challenges persist, including skills mismatch, regional access disparities, and budget limitations. Additionally, the structural nature of unemployment is exacerbated by the ongoing shift in the labor market's demand for skills. Despite efforts to address unemployment, there remains a need for policies that focus on long-term, sustainable solutions. This study recommends an integrated policy approach across education, investment, and social protection sectors to foster an inclusive and sustainable labor market that addresses the root causes of unemployment in Indonesia.*

Keywords: *Employment; Government Policy; Open Unemployment Rate; Policy Effectiveness; Unemployment.*

Abstrak. Pengangguran tetap menjadi tantangan struktural bagi perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 mencapai 4,85%, dengan 7,46 juta orang menganggur, sebagian besar di kalangan pemuda berusia 15-24 tahun. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang mengatasi pengangguran, menganalisis peran kebijakan tersebut, dan menilai efektivitasnya. Metode tinjauan pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan mengambil referensi dari jurnal akademik terindeks, laporan pemerintah, dan data statistik resmi. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk pelatihan kejuruan berbasis kompetensi, program tunai padat karya, pengembangan UMKM, promosi investasi, dan reformasi iklim bisnis. Kebijakan-kebijakan ini telah berkontribusi pada penurunan pengangguran secara bertahap, meskipun tantangan masih tetap ada, termasuk ketidaksesuaian keterampilan, kesenjangan akses regional, dan keterbatasan anggaran. Selain itu, sifat struktural pengangguran diperparah oleh pergeseran permintaan keterampilan di pasar tenaga kerja yang terus berlanjut. Terlepas dari upaya untuk mengatasi pengangguran, masih dibutuhkan kebijakan yang berfokus pada solusi jangka panjang dan berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan pendekatan kebijakan terpadu di sektor pendidikan, investasi, dan perlindungan sosial untuk mendorong pasar kerja yang inklusif dan berkelanjutan yang mengatasi akar penyebab pengangguran di Indonesia.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan; Kebijakan Pemerintah; Tingkat Pengangguran Terbuka; Efektivitas Kebijakan; Pengangguran.

1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja, perubahan struktur ekonomi, serta perkembangan teknologi yang mengubah kebutuhan tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan nasional, pengangguran tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga masalah sosial karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Secara ekonomi, tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan pemborosan potensi produksi barang dan jasa yang sebenarnya dapat dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai sekitar 7,46 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85%. Angka ini sempat mengalami penurunan menjadi sekitar 7,35 juta orang pada November 2025. Meskipun demikian, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya pada sektor formal. Memasuki awal tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,71% hingga 4,85%, dengan kelompok usia muda, terutama Generasi Z (15–24 tahun), masih mendominasi jumlah pengangguran.

Dampak pengangguran tidak hanya dirasakan oleh individu yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga memberikan pengaruh yang luas terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Dari sisi ekonomi, tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan pendapatan rumah tangga sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Penurunan daya beli ini pada akhirnya berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Ketika permintaan terhadap hasil produksi menurun, pelaku usaha cenderung menunda atau mengurangi investasi karena tidak adanya dorongan untuk memperluas usaha atau mendirikan industri baru. Kondisi tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan meningkatkan tingkat kemiskinan (Azzahra et al., 2024).

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan fiskal, moneter, serta kebijakan struktural yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Keberhasilan kebijakan

tersebut sangat bergantung pada keseimbangan penerapannya serta kesesuaiannya dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung (Al Ubaidillah & Yasin, 2024).

Secara konkret, pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk mengurangi tingkat pengangguran, seperti penyelenggaraan pelatihan kerja, peningkatan investasi di sektor infrastruktur, serta pemberian dukungan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, di wilayah perdesaan pemerintah memanfaatkan dana desa untuk menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya tunai, pemberian modal usaha, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang menganggur, setengah menganggur, maupun masyarakat miskin. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan tingkat pengangguran dapat terus ditekan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Nurrahman, 2020). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia, menganalisis peran kebijakan tersebut dalam mengurangi pengangguran, serta menilai tingkat efektivitasnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru (Apririandi, 2024). Menurut Al Ubaidillah dan Yasin (2024), pengangguran terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia melebihi permintaan tenaga kerja dalam suatu perekonomian, sehingga sebagian angkatan kerja tidak dapat terserap secara penuh dalam kegiatan produktif. Kondisi ini mencerminkan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang pada akhirnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan karakteristiknya, pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, pengangguran friksional, yang terjadi karena adanya jeda waktu antara seseorang meninggalkan pekerjaan lama dan mendapatkan pekerjaan baru. Kedua, pengangguran struktural, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Ketiga, pengangguran siklikal, yang dipicu oleh penurunan aktivitas ekonomi secara agregat. Keempat, pengangguran musiman, yang terjadi secara berkala pada periode waktu tertentu (Diniyah & Fisabilillah, 2022).

Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian

Pengangguran menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Dari perspektif ekonomi, pengangguran mengakibatkan

penurunan pendapatan rumah tangga yang berdampak pada melemahnya daya beli dan berkurangnya konsumsi masyarakat. Kondisi ini selanjutnya menekan permintaan agregat, menghambat ekspansi investasi, dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi (Irawan et al., 2024). Azzahra et al. (2024) menambahkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi juga berkaitan erat dengan peningkatan angka kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial yang dapat mengancam kohesi dan ketertiban masyarakat.

Pengangguran juga berdampak pada aspek fiskal negara karena meningkatnya kebutuhan jaminan sosial dan subsidi bagi kelompok penganggur membebani anggaran pemerintah. Di sisi lain, rendahnya penyerapan tenaga kerja menyebabkan hilangnya potensi output nasional secara signifikan, yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai output gap. Fenomena ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan pemerintah yang terencana dan terukur dalam mengatasi masalah pengangguran (Irawan et al., 2024).

Kebijakan Ketenagakerjaan: Kerangka Teoritis

Secara teoritis, kebijakan ketenagakerjaan pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama. Pertama, kebijakan aktif pasar tenaga kerja (Active Labour Market Policy/ALMP), yang mencakup program pelatihan kerja, subsidi upah, program kewirausahaan, dan mediasi ketenagakerjaan. Kedua, kebijakan pasif pasar tenaga kerja (Passive Labour Market Policy/PLMP), yang meliputi program tunjangan pengangguran dan jaminan sosial. Di Indonesia, pendekatan kebijakan aktif lebih dominan diterapkan mengingat besarnya jumlah angkatan kerja dan keterbatasan ruang fiskal negara (Septiyanti et al., 2025).

Teori human capital yang dipopulerkan oleh Becker menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan secara langsung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas akses ke pasar kerja formal, dan mengurangi risiko pengangguran struktural. Landasan teoritis ini menjadi dasar bagi berbagai program pelatihan vokasi dan pengembangan kompetensi yang dijalankan pemerintah Indonesia (Septiyanti et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber kepustakaan yang relevan secara sistematis. Studi literatur dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pengetahuan terkait suatu topik berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu. Pendekatan analisis yang digunakan

adalah deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan dan menginterpretasikan temuan dari berbagai sumber secara mendalam dan kontekstual.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA dan jurnal internasional terindeks Scopus yang diterbitkan dalam rentang tahun 2019–2025; laporan resmi pemerintah, termasuk dokumen Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia; data statistik resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan; serta buku teks ilmu ekonomi dan pembangunan yang relevan sebagai landasan teori.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan literatur dari basis data akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan portal resmi pemerintah. Pencarian literatur menggunakan kata kunci antara lain "pengangguran Indonesia", "kebijakan ketenagakerjaan", "efektivitas kebijakan pengangguran", serta "program padat karya dan UMKM". Proses seleksi literatur mengutamakan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran data.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses analisis meliputi tiga tahap mengacu pada model Miles dan Huberman, yaitu: (1) reduksi data, dengan cara memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dari berbagai sumber; (2) penyajian data, dengan mengorganisasikan temuan secara sistematis sesuai tema-tema utama; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data secara induktif berdasarkan pola dan temuan yang ditemukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pengangguran di Indonesia

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi akibat ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja, yaitu ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia (Apririandi, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya surplus penawaran tenaga kerja yang tidak dapat sepenuhnya diserap oleh pasar kerja sehingga menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran di suatu negara. Salah satu faktor utama penyebab pengangguran di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahun yang tidak diimbangi dengan penciptaan

lapangan kerja yang memadai menyebabkan persaingan yang semakin ketat di antara pencari kerja, baik lulusan baru maupun tenaga kerja yang telah berpengalaman (Apririandi, 2024).

Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya pengangguran adalah tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di masyarakat. Sebagian besar penganggur berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan maupun pelatihan keterampilan (Apririandi, 2024). Keterbatasan tersebut menyebabkan individu memiliki kemampuan dan kompetensi yang kurang memadai untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan juga menjadi faktor penting yang memicu terjadinya pengangguran. Individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga sebagian besar hanya dapat bekerja pada sektor pekerjaan kasar atau bahkan tidak memperoleh pekerjaan sama sekali (Apririandi, 2024).

Masuknya tenaga kerja baru ke dalam pasar kerja juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengangguran, khususnya di kalangan usia muda. Lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi umumnya membutuhkan waktu untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki. Di sisi lain, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan juga dapat meningkatkan jumlah pengangguran, biasanya terjadi akibat berakhirnya masa kontrak kerja, efisiensi perusahaan, atau pengurangan tenaga kerja untuk menstabilkan sistem operasional perusahaan (Apririandi, 2024).

Selain faktor-faktor tersebut, beberapa variabel ekonomi makro juga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum dapat memengaruhi tingkat pengangguran secara simultan (Diniyah & Fisabilillah, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat mendorong peningkatan aktivitas produksi sehingga menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, kenaikan upah minimum dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja sehingga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran (Diniyah & Fisabilillah, 2022). Dengan demikian, pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat struktural maupun ekonomi makro.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan pengangguran melalui pendekatan pembangunan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi serta membuka peluang kerja baru bagi masyarakat (Nurrahman, 2020). Salah satu

kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya saing investasi dan ekspor melalui kemudahan berusaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pemerintah juga menjalankan kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasional dan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Septiyanti et al., 2025).

Di samping itu, pemerintah mengimplementasikan berbagai program ekonomi seperti program padat karya, stimulus ekonomi, serta intervensi harga dan subsidi untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pemberian bimbingan teknis, dukungan manajemen, bantuan modal, serta perluasan akses pasar (Hia, 2013). Selain itu, pemerintah juga melakukan pembangunan dan pengembangan wilayah, khususnya daerah tertinggal dan terpencil, melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan komunikasi untuk membuka peluang usaha serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi (Hia, 2013).

Pemerintah juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan stabilitas keamanan guna menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri dan menciptakan lapangan kerja baru (Hia, 2013). Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi potensial seperti pariwisata, pertanian, dan kelautan sebagai sumber penciptaan lapangan kerja. Secara umum, berbagai kebijakan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan pengangguran memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi karena permasalahan pengangguran memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang kompleks (Septiyanti et al., 2025).

Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Hasil Penelitian terkait Keberhasilan Kebijakan

Secara agregat, berbagai kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam menekan angka pengangguran. Data BPS (2025) mencatat bahwa TPT Indonesia mengalami tren penurunan dari 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 4,85% pada Agustus 2025, menandakan adanya pemulihan pasar tenaga kerja yang cukup berarti dalam kurun waktu lima tahun. Keberhasilan ini tidak terlepas dari efek kombinasi beberapa program unggulan pemerintah.

Kartu Prakerja, yang diluncurkan sejak April 2020, menjadi salah satu instrumen kebijakan yang mendapat perhatian luas. Al Ubaidillah dan Yasin (2024) menyatakan bahwa

program ini berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi, khususnya pelatihan digital, dengan jumlah peserta yang melampaui 17 juta orang pada 2023. Program ini tidak hanya membekali pencari kerja dengan keterampilan baru, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup sementara kepada peserta selama masa transisi mencari pekerjaan. Di sisi lain, program pengembangan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti mampu meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil, yang secara langsung berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor informal (Nurrahman, 2020).

Kebijakan pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai juga memberikan kontribusi positif dalam penyerapan tenaga kerja jangka pendek, terutama di daerah perdesaan. Irawan et al. (2024) menjelaskan bahwa program padat karya yang diintegrasikan dengan Dana Desa berhasil menyerap jutaan tenaga kerja di pedesaan, mengurangi arus urbanisasi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara langsung. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis wilayah yang menasar akar permasalahan pengangguran di tingkat lokal memiliki potensi yang besar dalam mendukung penurunan TPT secara nasional.

Dampak Kebijakan terhadap Penurunan Pengangguran

Dampak kebijakan pemerintah terhadap penurunan pengangguran dapat ditelaah dari beberapa dimensi. Pertama, dari dimensi penyerapan tenaga kerja, data BPS (2025) menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir, dengan sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Peningkatan ini erat kaitannya dengan kebijakan investasi dan pembangunan infrastruktur yang masif dilaksanakan pemerintah.

Kedua, dari dimensi kualitas ketenagakerjaan, program pelatihan berbasis kompetensi dan vokasi yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Diniyah dan Fisabilillah (2022) menemukan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan kesehatan, berkorelasi negatif secara signifikan dengan tingkat pengangguran. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kebijakan investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia merupakan strategi jangka panjang yang efektif dalam menekan angka pengangguran.

Ketiga, dari dimensi kewirausahaan, kebijakan pengembangan UMKM dan kemudahan akses permodalan terbukti mendorong tumbuhnya unit-unit usaha baru. Septiyanti et al. (2025) mencatat bahwa UMKM hingga saat ini masih menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja Indonesia, dengan kontribusi mencapai lebih dari 97% total tenaga kerja nasional. Hal ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem kewirausahaan merupakan salah satu kebijakan

paling efektif dalam mengatasi pengangguran, terutama di tengah keterbatasan lapangan kerja sektor formal.

Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan

Meskipun berbagai kebijakan menunjukkan dampak positif, terdapat sejumlah kendala yang membatasi efektivitasnya secara menyeluruh. Pertama, masalah skill mismatch atau kesenjangan keterampilan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Apririandi (2024) menegaskan bahwa sebagian besar program pelatihan yang tersedia belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan industri masa depan, terutama yang berkaitan dengan kompetensi digital dan teknologi tinggi.

Kedua, ketimpangan akses program antarwilayah masih menjadi hambatan serius. Program-program ketenagakerjaan cenderung lebih mudah diakses oleh masyarakat di perkotaan dan di Pulau Jawa dibandingkan wilayah perdesaan dan kawasan Indonesia bagian timur. Kondisi ini memperlebar kesenjangan kualitas tenaga kerja antardaerah dan menghambat pemerataan manfaat kebijakan (Hia, 2013).

Ketiga, keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam perluasan skala dan jangkauan program. Alokasi anggaran untuk program ketenagakerjaan aktif di Indonesia masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain di kawasan ASEAN. Septiyanti et al. (2025) menekankan bahwa efektivitas kebijakan ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh konsistensi dan keberlanjutan pembiayaannya, sehingga diperlukan komitmen fiskal jangka panjang dari pemerintah.

Keempat, koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan. Program-program yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga seringkali berjalan secara parsial tanpa integrasi yang memadai, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas keseluruhan kebijakan (Al Ubaidillah & Yasin, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beragam kebijakan ketenagakerjaan yang bersifat aktif dan komprehensif, meliputi program Kartu Prakerja, pelatihan kerja berbasis kompetensi, program padat karya tunai, pengembangan UMKM melalui KUR, serta reformasi iklim investasi. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, dan mendorong kewirausahaan.

Kedua, peran kebijakan pemerintah terbukti signifikan dalam memperluas akses pendidikan dan pelatihan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja melalui investasi dan program padat karya, serta mendorong pertumbuhan wirausaha di tingkat masyarakat. Dampak gabungan dari berbagai kebijakan ini tercermin dalam penurunan TPT dari 7,07% pada 2020 menjadi 4,85% pada Agustus 2025 (BPS, 2025).

Ketiga, efektivitas kebijakan masih bersifat parsial dan belum merata. Meskipun terjadi penurunan angka pengangguran secara agregat, masalah struktural seperti skill mismatch, ketimpangan akses antarwilayah, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan utama yang perlu ditangani secara sistematis (Apririandi, 2024; Septiyanti et al., 2025).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara kebijakan pendidikan vokasi, kebijakan investasi, dan perlindungan sosial dalam satu kerangka strategi ketenagakerjaan nasional yang terpadu dan berorientasi jangka panjang. Kedua, anggaran untuk program ketenagakerjaan aktif perlu ditingkatkan secara bertahap dan diimbangi dengan sistem evaluasi berbasis data yang transparan dan akuntabel. Ketiga, program pelatihan kerja harus dirancang berdasarkan proyeksi kebutuhan industri masa depan dengan menekankan kompetensi digital, kecerdasan buatan, dan keterampilan abad ke-21 untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Keempat, pemerataan akses program ketenagakerjaan ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah tertinggal dan terluar, perlu menjadi prioritas agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelima, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan berbasis data primer untuk mengukur dampak masing-masing kebijakan ketenagakerjaan secara lebih akurat dan terukur.

DAFTAR REFERENSI

- Al Ubaidillah, M. R. S., & Yasin, M. (2024). Analisis pengangguran dan kebijakan pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 34-42. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2123>
- Afifah. (2024). Analisis penyebab peningkatan angka pengangguran dan penghambat ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE)*, 2(8), 613-621.
- Azzahra, S. F., Putri, L. D., Purba, F. Y., Tanjung, D., Rezkitaputri, A., & Zulva, R. Z. D. (2024). Dampak pengangguran terhadap stabilitas sosial dan perekonomian Indonesia. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 220-233. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.719>

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025, 5 November). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah (Berita Resmi Statistik No. 103/11/Th. XXVIII). Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Diniyah, H., & Fisabilillah, L. W. P. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 2(2), 155-168. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50992>
- Fadhlurrahman, M. I., & Wahyudi, S. T. (2023). Evaluasi program Kartu Prakerja dalam meningkatkan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 45-58.
- Hia, Y. D. (2013). Strategi dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. *Economica: Journal of Economic and Economic Education*, 1(2), 208-213. <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>
- Irawan, Raysharie, P. I., Tesalonika, Septianingsih, D., Samman, M., Satrio, M., Sari, N., Nisa, S. P., & Zulkarnain. (2024). Pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 98-106. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i1.258>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022*. Jakarta: Kemnaker RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar tahun 2021-2022*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Nurrahman, A. (2020). Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 2(1), 5-12. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v2i1.2559>
- Pratama, Y. C. (2022). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pasca pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 1-15.
- Septiyanti, G. A. P., Putri, D. H., Zirani, N. D., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 802-808.
- Susanti, R., & Nuraini, I. (2023). Pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 23(2), 112-127. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.647>
- Widodo, T., & Sari, D. W. (2021). Efektivitas program padat karya tunai dalam mengurangi pengangguran di perdesaan: Bukti dari program Dana Desa. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(2), 187-203